

PATRIOTISME BUTA DAN KONSTRUKTIF DALAM PENDIDIKAN SEJARAH BERWAWASAN KEBANGSAAN

Mahrus Afandi

Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Malang
Jalan Semarang Nomor 5 Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
e-mail: mahrus.afandi681995@gmail.com

Submitted
2022-09-28

Accepted
2022-12-04

Published
2022-12-19

OPEN ACCESS



Abstrak

Pembelajaran sejarah yang hanya bertumpu pada satu buku teks rentan dimanfaatkan oleh pihak penguasa. Pembelajaran sejarah dimonopoli demi realitas intersubjektif berupa kebanggaan dan kesetiaan terhadap penguasa yang biasanya berkaitan dengan penghapusan sejarah mengenai apa yang disebut masa kelam di masa lalu dan peran vital minoritas dalam bangsa. Pembelajaran sejarah berwawasan kebangsaan tidak harus meniscayakan adanya loyalitas yang membutuhkan objektivitas dan menghapus sikap kritis terhadap bangsa. Peristiwa yang dianggap kelam tidak boleh dilupakan. Keberadaan kaum minoritas dalam pembangunan bangsa tidak boleh disembunyikan dari pembelajaran sejarah. Narasi mengenai peran pihak minoritas dalam pembelajaran sejarah dapat digunakan untuk menjaga kohesi dan persatuan agar menjadi lebih kuat. Kajian yang dilakukan membahas bagaimana pembelajaran sejarah nasional harus diwujudkan tanpa menimbulkan kebencian. Pembelajaran sejarah nasional juga harus memberikan kesadaran akan pentingnya mempelajari peristiwa kelam di masa lalu untuk dijadikan perbaikan dan melakukan langkah-langkah progresif bagi anak bangsa di masa depan.

Kata Kunci: pembelajaran sejarah berwawasan kebangsaan; patriotisme; penyelidikan sejarah.

Abstract

History learning relying on only one textbook is susceptibly utilized by the ruling party. History learning is monopolized for the sake of an intersubjective reality in the form of pride and loyalty toward the ruler, which usually coincides with the elimination of history regarding the so-called dark times in the past and the vital role of minorities in the nation. History learning with the national perspective should not necessitate the existence of a type of loyalty that blinds objectivity and erases a critical standpoint toward the nation. Therefore, events considered dark should not be forgotten. Likewise, the existence of minority people in nation-building should not be hidden from historical learning. Because the narrative regarding the role of minority parties in history learning can be used to maintain social cohesion and unity to become stronger. This article, through conducting a literature study, discusses how national history learning should be realized without creating hatred, and simultaneously should provide awareness of the importance of studying dark events in the past to get improvement and commit new progressive steps for the nation's children in the future.

Keywords: national history learning; patriotism; historical inquiry.



PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai pengalaman mengenai perdebatan isu pribumi dan nonpribumi yang merebak pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017. Penggunaan sentimen agama, etnis, dan budaya dalam peristiwa tersebut dipakai untuk memperoleh dukungan politis. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum bisa belajar dari sejarah di masa lalu saat pemerintah Hindia Belanda memainkan agenda politik identitas yang serupa untuk memutus hubungan antara golongan Tionghoa dan warga yang lain (Aziz, 2018).

Penggunaan isu identitas juga terjadi di negara-negara lain. Perebutan identitas mengenai siapa pribumi dan siapa nonpribumi adalah isu yang bisa dimanfaatkan dalam proses perebutan kekuasaan di suatu negara. Munculnya gerakan penolakan terhadap imigran di Amerika, misalnya, adalah salah satu varian tanda menguatnya perebutan identitas yang selalu berhubungan dengan usaha untuk menjaga status *privilege* yang dinikmati (Delap & Morgan, 2013). Terkadang, golongan yang dianggap sebagai nonpribumi, bisa jadi mempunyai jasa yang besar bagi golongan yang mengaku sebagai pribumi. Praktik tersebut disebut sebagai pola patriotisme buta (Schatz, 2020).

Terdapat beberapa studi yang mengungkap bahwa praktik patriotisme buta juga terjadi di beberapa negara selain Indonesia, seperti hasil studi yang mengungkapkan bahwa hubungan interpersonal warga pribumi yang menguat pada konteks imigran di Finlandia bisa menghasilkan perilaku yang negatif dari warga negara pribumi terhadap kelompok imigran (Finell & Stevenson, 2022). Akan tetapi, selain memiliki efek negatif, hubungan interpersonal yang menguat antarwarga negara juga menimbulkan efek positif berupa sikap warga negara Finlandia memiliki kemauan untuk memelihara budaya Finlandia (Finell & Stevenson, 2022). Temuan lainnya menyatakan bahwa perasaan identifikasi yang kuat kepada warga negara pada konteks Amerika Serikat bisa mendorong munculnya penolakan untuk mengkritik negara, tetapi pada kondisi tertentu juga bisa menimbulkan kesediaan untuk mengkritik negara (Barnes *et al.*, 2016).

Agen yang menjadi penentu pola patriotisme semacam apa yang ada dalam suatu negara adalah lembaga pendidikan. Beberapa partisipan siswa di Amerika

Serikat menafsirkan Ikrar Setia kepada Amerika Serikat (AS) (*the Pledge of Allegiance*) dengan interpretasi yang dekat dengan patriotisme buta (Martin, 2012). Studi lain menghubungkan kiprah lembaga pendidikan dengan corak patriotisme, hasilnya mengungkapkan bahwa pendekatan yang terfokus pada prestasi negara, konformitas, dan tradisi semata pada konteks pendidikan di Turki dapat meningkatkan peluang terbentuknya pola patriotisme buta; berbeda dengan pendekatan yang terfokus pada universalisme dan stimulasi yang bisa meningkatkan peluang munculnya patriotisme konstruktif (Yazıcı, 2022). Hasil studi lain juga menyimpulkan bahwa faktor demografis dan aspek *collective-self* (bagaimana situasi ruang publik komunitas tempat asal mahasiswa) memengaruhi tendensi patriotisme (Ercan, 2017).

Peran pendidikan sejarah dalam membentuk pola patriotisme belum pernah ada hasil studinya. Peristiwa sejarah bisa dijadikan contoh untuk memahami patriotisme dan sangat berpotensi untuk menentukan bentuk pola patriotisme suatu negara. Kajian yang penulis lakukan mengulas dinamika yang terjadi dalam upaya penanaman kecintaan terhadap negara melalui pendidikan sejarah berwawasan kebangsaan yang tidak selalu berujung pada prinsip memanusiaikan manusia yang perlu diperhatikan oleh pendidik sejarah. Kajian yang dilakukan membahas mengenai bagaimana seharusnya pembelajaran sejarah berwawasan kebangsaan terwujud tanpa menciptakan kebencian dan dengan kesadaran mengenai pentingnya mempelajari peristiwa kelam di masa lalu untuk menjadi bahan perbaikan dan pedoman bagi langkah anak bangsa di masa yang akan datang.

Kajian yang dilakukan memakai pendekatan yang secara sistematis mengumpulkan dan mensintesis studi sebelumnya (Tranfield *et al.*, 2003; Baumeister & Leary 1997). Tujuan dari kajian yang dilakukan yaitu menilai, mengkritik, dan mensintesis literatur yang berhubungan dengan topik studi yang dipilih untuk memunculkan kerangka teori dan/atau perspektif baru. Sumber data berasal dari 20 buku, 18 artikel jurnal ilmiah, dan teks terbitan lainnya. Kontribusi dari kajian yang dilakukan berupa klasifikasi model atau kerangka teoretis (Snyder, 2019). Tahapan pengkajian terdiri dari: pengumpulan data yang dihimpun dari Google Scholar dan *wordcat.org*; pembacaan dan pencatatan data dengan bantuan



program aplikasi NVivo; serta memproses informasi yang relevan untuk digunakan dalam menemukan kesimpulan dari kajian yang dilakukan.

Keterbukaan Penyelidikan Sejarah *Versus* Pemerintah Otoriter

Pemerintah Soviet telah menugasi Aleksandr Tretetsky (kolonel angkatan bersenjata Soviet) beberapa bulan sebelum Agustus 1991 untuk mengelola penggalian kuburan massal dekat hutan Katyn di Polandia bagian timur (Salevouris, 2015). Makam-makam tersebut berisi ribuan jenazah perwira Polandia yang menurut versi Soviet telah dibunuh oleh NAZI selama penyerbuannya ke Polandia bagian timur dan Soviet pada tahun 1941. Berbagai petunjuk yang telah beredar selama bertahun-tahun mengindikasikan bahwa polisi rahasia Soviet sebenarnya bertanggung jawab atas pembantaian tersebut, tetapi di Soviet, kisah-kisah demikian telah ditutupi oleh negara. Kontrol informasi yang berada di pusat merupakan faktor penting dalam mempertahankan pemerintahan komunisme yang panjang selama 70 tahun di Soviet. Laporan atau berita di pers, produksi film, dan buku pelajaran sejarah harus mengalami proses sensor oleh birokrasi Moskow.

Rakyat Soviet hanya menerima versi partai yang sedang berkuasa dan mengikuti sistem yang secara sistematis menyembunyikan kejahatan rezim Soviet di masa awal. Seluruh bangsa, dengan beberapa pengecualian, percaya kepada dongeng besar buatan pemerintah. Keadaan mulai berubah pada pertengahan 1980-an, khususnya ketika Mikhail Gorbachev berkuasa sebagai pemimpin Partai Komunis Uni Soviet. Gorbachev adalah penganut yang benar dalam sistem komunis, tetapi pada saat yang sama, Gorbachev yang membawa Uni Soviet ke jalur baru glasnost. Glasnost atau keterbukaan mempunyai implikasi berupa kecenderungan untuk jujur mengenai catatan sejarah. Gorbachev tampaknya percaya bahwa arah perkembangan negara sosialis akan membaik jika Gorbachev mengakui dosa-dosa negaranya di masa lalu. Namun, yang terjadi jauh dari perkiraan Gorbachev. “Kembalinya sejarah” mengguncang fondasi rezim Soviet dan akhirnya meruntuhkan negara komunis (Remnick, 1994).

Setelah kudeta pada Agustus 1991 oleh Partai Komunis garis keras terhadap Gorbachev gagal, Kolonel Tretetsky mampu melanjutkan pekerjaan investigasi

pembantaian dalam rangka mengonfirmasi bahwa peristiwa tersebut memang operasi polisi rahasia Soviet. Para sejarawan, peneliti, penulis, dan wartawan dengan catatan sejarah yang terbuka, menyajikan kisah-kisah yang rumit tentang kejahatan komunis di masa lalu. Akhirnya, rakyat Soviet diberi tahu bahwa sejak Revolusi Soviet pada tahun 1917, jutaan warga telah dibantai dan banyak yang dipenjara tanpa diadili di kamp kerja paksa Siberia. *The return of history* menghancurkan kredibilitas komunis sekaligus kekuasaannya untuk memerintah.

Kembalinya sejarah ke kehidupan pribadi, intelektual, dan politik merupakan awal dari reformasi besar abad ke-20. Namun, ironi terakhir adalah rezim Rusia, Vladimir Putin, telah mencoba untuk mengembalikan sejarah dengan memuliakan kejahatan Stalin yang oleh Kolonel Tretetsky diusahakan untuk diekspos. Pemerintah Putin berinisiatif menyusun kembali kurikulum nasional pada tahun 2007 yang mengajari anak-anak sekolah bahwa tindakan Stalin merupakan hal yang masuk akal (Whitaker, 2012). Arsip organisasi hak asasi manusia yang terkenal, Memorial, diserbu pada tahun yang sama. Polisi menyita gambar-gambar dari kekejaman Stalinist, bersama dengan kesaksian lisan selama 20 tahun yang mengisahkan kehidupan sehari-hari selama rezimnya.

Berdasarkan kisah tersebut, penyelidikan historis yang bebas dan terbuka bertentangan dengan kepentingan pemerintah yang memiliki ambisi otoriter (Salevouris, 2015). Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa ada perdebatan yang unik mengenai apa tujuan dari pembelajaran sejarah (Osler, 2009). Perdebatan tersebut dikenal sebagai *knowledge versus skills* (Lee & Ashby, 2000). Representasi dari *knowledge party* adalah para politisi yang mempunyai kepentingan untuk menciptakan *intersubjective reality* mengenai loyalitas terhadap kebesaran bangsa dan segala atributnya. *Skill party* merupakan representasi dari para pendidik sejarah yang mempunyai kepentingan mengajarkan kemampuan berpikir kesejarahan.

Kepentingan pemerintah yang menghendaki narasi sejarah harus sesuai dengan kepentingannya menghasilkan *intersubjective reality* atau tatanan yang diimajinasikan memang tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Keberadaannya terbukti secara historis memiliki potensi untuk mendorong manusia tetap bersedia saling membantu, gotong royong, bertransaksi, dan mewujudkan keteraturan sosial



yang lain dalam kehidupan sehari-hari (Harari, 2015). Namun, pada konteks tertentu, hal tersebut bisa dimanfaatkan penguasa yang memiliki kepentingan pribadi, seperti yang dilakukan rezim Uni Soviet sebelum era Gorbachev.

Muncul beberapa pandangan yang berbeda dari kalangan ilmuwan sosial dalam memandang fungsi lembaga pendidikan dalam hal peran penanaman wawasan kebangsaan. Ilmuwan sosial yang beraliran fungsionalis memandang peran pendidikan sebagai agen penanaman wawasan kebangsaan dianggap sebagai wujud usaha menciptakan kohesi dan harmoni masyarakat (Parsons, 2017; Madan, 2010; Dreeben, 2002; Durkheim, 1961). Ilmuwan sosial yang beraliran kritis atau *conflict theory* beranggapan bahwa peran pendidikan tersebut dipandang sebagai ajang pertempuran politis, dimana patriotisme sering kali merupakan pemaksaan budaya yang dianut oleh kaum mayoritas terhadap kaum minoritas (McLaren, 2015). Dua pandangan dari aliran ilmu sosial tersebut melahirkan pandangan biner mengenai keberadaan usaha penanaman patriotisme dalam proses pendidikan berupa *blind patriotism* dan *constructive patriotism* (Schatz, 2020).

Patriotisme Buta

Mengajar sejarah di masyarakat yang secara kultural beragam, mempunyai potensi memunculkan perasaan keterpisahan antara “kami (*us*)” dan “mereka (*them*)” (Christou, 2007). Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam konteks penanaman *intersubjective reality* mengenai patriotisme. Sejarah resmi yang diajarkan di lembaga pendidikan (sekolah) pada umumnya memiliki narasi kolektif yang intinya mendorong siswa untuk menghargai bangsanya. Kurikulum sejarah nasional pada kondisi demikian cenderung menyebarkan visi yang diinginkan suatu bangsa tentang dirinya dan meminimalkan referensi yang mengarah kepada “halaman kelam” dalam sejarahnya (Fukuoka, 2018; Guex, 2015; Foulcher, 2010).

Hubungan sejarah adalah hubungan yang kompleks karena tidak hanya melibatkan pertanyaan tentang kebenaran dan representasi dari kebenaran tersebut, tetapi juga terkait dimensi sosial dan politik mengenai penentuan antara mana yang diingat dan mana yang dilupakan (Josias, 2011; Olick *et al.*, 2011). Berdasarkan

konteks negara-bangsa modern, afiliasi ingatan dan sejarah jauh lebih kompleks dan sering kali diperdebatkan. Memori kolektif masyarakat dibentuk ulang untuk membangun ingatan nasional baru yang diformalkan, hingga menjadi sejarah yang sakral (*sacred history*) dan sering kali ingatan kaum minoritas yang menjadi korban di masa lalu diabaikan dan ditekan karena dianggap sebagai memori yang berbahaya (Nora, 1989). Jika hal tersebut ditradisikan dengan konsisten, maka akan muncul gejala yang disebut sebagai *blind patriotism*.

Seseorang yang menganut *blind patriotism* mengadopsi sikap dukungan yang mutlak untuk negaranya, menolak adanya kritik, serta menekankan pada kesetiaan dan perilaku simbolik (Schatz, 2020). Jenis patriotisme demikian sering kali dilekatkan dengan nasionalisme yang menegaskan superioritas bangsanya dan mendukung dominasi bangsanya terhadap bangsa yang lain (Gewirtz *et al.*, 2013). Bentuk patriotisme tersebut tidak sejalan dengan institusi pendidikan yang demokratis. Sikap intoleransi terhadap kritik menandakan kurangnya sesuatu yang oleh John Dewey disebut sebagai *free and full interplay* atau interaksi yang bebas (Hopkins, 2018; van-der-Ploeg, 2016; Garrison *et al.*, 2015; Hansen, 2012). Patriotisme demikian mengaburkan nilai perdebatan yang masuk akal serta gagal menghargai analisis dan kritik sebagai titik awal untuk mengadakan perbaikan (Schatz, 2020).

Patriotisme Konstruktif

Tujuan pembelajaran sejarah di sekolah tidak hanya untuk menyebarkan versi tertentu dari peristiwa masa lalu, tetapi juga untuk menanamkan kecintaan pada bangsa. Jika pengajaran sejarah menghasilkan perpecahan yang berkobar-kobar, maka hal tersebut harus dihindari. Pendidikan harus melayani tujuan moral dengan menggabungkan etos dan patriot siswa yang baik (Schatz, 2020; Bryant, 2001). Sejarah perlu tidak hanya dianggap sebagai teks resmi, tetapi juga suci karena tujuan moralnya berupa membangkitkan perasaan positif bagi seseorang terhadap bangsanya. Seperti teks suci lainnya (misalnya Al-Kitab, Al-Quran), sejarah tertulis yang resmi sering diklaim berdiri di atas kepentingan manusia atau politik dan memiliki karakter yang hampir religius.



Penulisan sejarah adalah manifestasi dari negara-bangsa sekuler modern, tetapi penulisan sejarah sering kali berperan layaknya bentuk agama lain (Christou, 2007). Hal tersebut selaras dengan analisis mengenai bangsa sebagai komunitas moral yang terikat oleh kesadaran kolektif (Durkheim, 2013; Ikkos & McQueen, 2019). Durkheim menggambarkan apa yang disebutnya sebagai transisi dari kesukuan ke masyarakat industri modern dan pergeseran dari solidaritas ‘mekanis’ ke ‘organik’. Masyarakat modern menggantikan peran tradisional agama dengan cita-cita yang sama sakralnya, yaitu persatuan. Nasionalisme telah memantik emosi yang tertanam mendalam dengan sering kali menggunakan interpretasi mengenai masa lalu untuk mendukung terjadinya persatuan nasional (Smith & Smith, 2013).

Nasionalisme dianggap menciptakan ‘agama sejarah’. Hal tersebut bertentangan dengan *nature of history* atau sifat dasar sejarah sendiri, bahwa *written history*, sejarah yang tertulis, bukan merupakan kebenaran objektif. Sekali peristiwa sejarah ditulis, maka peristiwa sejarah menjadi subjektif. Semua catatan sejarah adalah rekonstruksi yang mengandung beberapa tingkat subjektivitas. Secara tertulis atau lisan, setiap bagian dari sejarah adalah pandangan individual dari segmen realitas masa lalu, visi tertentu, dan kecenderungan tertentu. Menulis sejarah adalah tindakan penciptaan, atau lebih tepatnya, penciptaan kembali (*recreation*), dimana pikiran sejarawan menjadi katalisnya. Setiap bagian sejarah yang dibaca atau didengar harus diperlakukan sebagai ciptaan individu (Salevouris, 2015). Sejarah tertulis yang resmi juga tidak lepas dari sifat dasar sejarah tersebut, sebab sejarah telah membuktikan bahwa adakalanya sejarah yang tertulis resmi tersebut merupakan narasi yang penuh dengan kepentingan penguasa untuk mempertahankan kuasanya.

Contoh yang bisa dijadikan bukti adanya kepentingan penguasa untuk mempertahankan kuasanya adalah topik seperti perbudakan atau gerakan perempuan jarang bisa masuk ke buku sejarah demi menghindari konflik serta menekankan kesinambungan dan harmoni dalam masyarakat (Apple, 2018). Proses pembentukan bangsa sering kali melibatkan pembungkaman suara-suara yang tidak setuju dalam mempertanyakan bagaimana tanggung jawab nasional dan sipil (Yuval-Davis, 2014).

Penanganan masalah dalam pengajaran sejarah seperti dimasukkannya ‘orang lain’ atau *the others* dalam kurikulum sejarah nasional, multiperspektif dalam sejarah, serta kemampuan analisis siswa untuk menegosiasikan kompleksitas pengorganisasian pengetahuan sejarah telah menjadi isu penting dalam penelitian pendidikan sejarah (Arthur, 2012; Stearns *et al.*, 2000). Tantangan bagi sistem pendidikan adalah menyeimbangkan pengajaran pendidikan multikultural dengan kebutuhan atau tuntutan untuk memelihara rasa bangga terhadap identitas nasional (Harjatanaya & Hoon, 2020). Tantangan tersebut harus dijawab oleh institusi pendidikan (terutama pendidikan sejarah) demi memunculkan jenis patriotisme konstruktif (*constructive patriotism*).

Patriotisme konstruktif memiliki karakteristik berupa memuji tindakan atau kebijakan negara yang baik, tetapi juga mengkritisi tindakan atau kebijakan yang tidak baik dalam rangka berupaya untuk mempromosikan perubahan positif yang sesuai dengan cita-cita bangsa yang ideal (Schatz, 2020). Misalnya, kebijakan imperialis yang meskipun menguntungkan warga negara yang menerapkannya, tetapi kebijakan imperialis harus ditolak karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi. Patriotisme konstruktif mempertimbangkan berbagai perspektif yang berisi kritik sebagai *critical loyalty* atau kesetiaan kritis (Staub, 1992). Kritik tidak dipandang sebagai perilaku tidak loyal, tetapi malah dianggap sebagai masukan yang menjadi renungan untuk menempuh tatanan yang lebih baik.

Objektivitas Peristiwa Sejarah dan Subjektivitas Penulisan Sejarah

Peristiwa sejarah adalah sesuatu yang objektif, sedangkan penulisan sejarah adalah sesuatu yang subjektif, sehingga yang seharusnya pantas dianggap sakral adalah peristiwa sejarah, bukan penulisan sejarah. Penulisan sejarah tidak lepas dari subjektivitas penulisnya. Abu Hamid Muhammad Al-Ghozali (1413 H: 63), salah satu ilmuwan Muslim, pernah menganalogikan sesuatu yang sakral dalam agama Islam, yakni Al-Qur'an dan hadis, sebagai pohon yang mempunyai potensi untuk berbuah. Suatu pohon akan benar-benar berbuah apabila si perawat pohon mempunyai ilmu untuk merawat pohon dan si perawat bersedia menerapkan ilmunya. Peristiwa sejarah adalah sesuatu yang sakral, peristiwa sejarah seperti



pohon yang mempunyai potensi untuk berbuah. Namun, hal tersebut tergantung pada penafsirnya, sebagai perawat buah tersebut. Saat seseorang memiliki ilmu interpretasi sejarah, beserta metodologinya secara mumpuni, maka orang tersebut mempunyai peluang besar untuk menghasilkan buah berupa interpretasi sejarah yang adil dan bisa menjadi pedoman untuk mendialogkan masa kini serta masa lalu.

Pendidik harus bisa memperkuat pemahaman siswa mengenai patriotisme dan nasionalisme supaya siswa mempunyai pandangan yang lebih jelas. Mengingat patriotisme dan nasionalisme merupakan dua karakter yang harus dimiliki oleh setiap individu sebagai sarana baginya untuk menjadi bagian dari masyarakat (Rajilun, 2019). Mengingat patriotisme merupakan tujuan afektif dari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial (Öztürk *et al.*, 2016), pendidik harus memastikan siswanya mendasari patriotismenya dengan mengapresiasi cita-cita dan praktik demokrasi negara yang ideal, tidak dengan loyalitas buta yang bercirikan adanya pandangan kebangsaan bersifat mengkonfrontasi, bukan sebagai entitas yang unik (Finell & Zogmaister, 2015); menolak kritik, tidak terbuka kepada kritik; loyalitas yang teguh, bukan loyalitas yang kritis; bersikap eksklusif terhadap kelompok lain; dan menolak mengakui pelanggaran bangsanya terhadap pihak lain. Semua ciri-ciri tersebut berakar dari keterikatan simbolik pada citra bangsa yang dianggap ideal (Schatz, 2018).

Pendidik tidak cuma sekadar mengajari siswanya untuk mencintai negaranya, tetapi juga menciptakan koneksi antara kecintaan kepada negara dan cita-cita demokrasi yang ideal. Hal tersebut dikenal sebagai patriotisme konstruktif. Pembelajaran sejarah memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembelajaran berwawasan kebangsaan yang konstruktif tersebut. Pendidik sejarah memiliki peran penting dalam membantu siswanya mengembangkan pemikiran kritis mengenai bentuk patriotisme yang tidak mencederai komitmen berdemokrasi (Schatz, 2020). Tugas seorang pendidik sejarah adalah mendorong siswa berpikir radikal dalam mengkaji teks sejarah, tidak memandang apa yang ada di teks sebagai kebenaran absolut. Siswa tidak selalu memandang manusia sebagai pandangan biner hitam *versus* putih.

SIMPULAN

Pendidik sejarah mempunyai tugas penting untuk memfasilitasi siswa dalam mempelajari sejarah sesuai dengan paradigma ilmu sejarah yang sesungguhnya. Tidak menganggap teks sejarah, baik yang resmi maupun tidak, sebagai kebenaran absolut, tetapi menganggapnya sebagai argumen atau hasil produksi dari penulisnya yang tidak lepas dari subjektivitas. Ketika teks pembelajaran sejarah berwawasan dianggap sebagai argumen, siswa dibiasakan untuk lebih inklusif terhadap perspektif lain yang berbeda dari teks yang siswa kenal, mengujinya secara kritis yang pada akhirnya siswa bisa mendialogkan masa kini dengan masa lalu secara lebih adil sehingga siswa diharapkan terbiasa untuk berbuat adil sejak dalam pikiran dan nantinya berwujud dalam perbuatan. Siswa diharapkan bisa mempunyai jiwa patriotisme yang membangun negaranya (patriotisme konstruktif) dengan dasar argumen yang kritis.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple, M. (2018). *Ideology and Curriculum*. Oxfordshire: Routledge.
- Arthur, J. (2012). *Issues in History Teaching*. Oxfordshire: Routledge.
- Aziz, M. (2018). *Merawat Kebinekaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Barnes, C. D., Pomerantz, A., & Yashko, L. (2016). Children Cover Your Eyes: Masculine Honor and the Role of Blind Patriotism in Teaching National Allegiance to Posterity. *Political Psychology*, 37(6), 817-834.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing Narrative Literature Reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311-320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>.
- Bryant, R. (2001). An Aesthetics of Self: Moral Remaking and Cypriot Education. *Comparative Studies in Society and History*, 43(3), 583-614.
- Christou, M. (2007). The Language of Patriotism: Sacred History and Dangerous Memories. *British Journal of Sociology of Education*, 28(6), 709-722. <https://doi.org/10.1080/01425690701609946>.
- Delap, L., & Morgan, S. (2013). *Men, Masculinities and Religious Change in Twentieth-Century Britain*. Berlin: Springer.



- Dreeben, R. (2002). *On What is Learned in School*. Boston: Addison Wesley Publishing Company.
- Durkheim, E. (2013). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Durkheim, E. (1961). *Moral Education*. New York: Free Press.
- Ercan, H. (2017). Self-Construal and Demographic Variables as Predictors of Blind and Constructive Patriotism in University Students. *International Journal of Higher Education*, 6(6), 170-179. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v6n6p170>.
- Finell, E., & Stevenson, C. (2022). Interpersonal Bonds with Fellow Nationals, Blind Patriotism and Preference for Immigrants' Acculturation. *Scandinavian Journal of Psychology*, 63(4), 383-392. <https://doi.org/10.1111/sjop.12817>.
- Finell, E., & Zogmaister, C. (2015). Blind and Constructive Patriotism, National Symbols and Outgroup Attitudes. *Scandinavian Journal of Psychology*, 56(2), 189-197. <https://doi.org/10.1111/sjop.12193>.
- Foulcher, K. (2010). State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 25(1), 139-142. <https://doi.org/10.4324/9780203099827>.
- Fukuoka, K. (2018). Japanese History Textbook Controversy at a Crossroads?: Joint History Research, Politicization of Textbook Adoption Process, and Apology Fatigue in Japan. *Global Change, Peace & Security*, 30(3), 313-334. <https://doi.org/10.1080/14781158.2018.1501012>.
- Garrison, J., Neubert, S., & Reich, K. (2015). *Democracy and Education Reconsidered: Dewey After One Hundred Years*. Oxfordshire: Routledge.
- Gewirtz, J. L., Kurtines, W. M., & Lamb, J. L. (2013). *Intersections with Attachment*. London: Psychology Press.
- Guex, S. (2015). The History Textbook Controversy in Japan and South Korea. *Cipango-French Journal of Japanese Studies*. 4(2015), 1-20. <https://doi.org/10.4000/cjs.968>.
- Hansen, D. T. (2012). *John Dewey and Our Educational Prospect: A Critical Engagement with Dewey's Democracy and Education*. New York: SUNY Press.
- Harari, Y. N. (2015). *Homo Deus: A Brief History of Tomorrow*. New York:

HarperCollins Publisher.

- Harjatanaya, T. Y., & Hoon, C.-Y. (2020). Politics of Multicultural Education in Post-Suharto Indonesia: A Study of the Chinese Minority. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 50(1), 18-35. <https://doi.org/10.1080/03057925.2018.1493573>.
- Hopkins, N. (2018). Dewey, Democracy and Education, and the School Curriculum. *Education 3-13*, 46(4), 433-440. <https://doi.org/10.1080/03004279.2018.1445477>.
- Ikkos, G., & McQueen, D. (2019). Reflections on the Elementary Forms of Religious Life—Reflections. *The British Journal of Psychiatry*, 214(5), 304-305. <https://doi.org/10.1192/bjp.2019.71>.
- Josias, A. (2011). Toward an Understanding of Archives as a Feature of Collective Memory. *Archival Science*, 11(1), 95-112. <https://doi.org/10.1007/s10502-011-9136-3>.
- Lee, P., & Ashby, R. (2000). *Progression in Historical Understanding among Students Ages 7-14 in Knowing, Teaching, and Learning History: National and International Perspectives*. New York: New York University Press.
- Madan, A. (2010). Emile Durkheim on Moral Education. *Contemporary Education Dialogue*, 7(2), 225-248. <https://doi.org/10.1177/0973184913411211>.
- Martin, L. A. (2012). Blind Patriotism or Active Citizenship? How do Students Interpret the Pledge of Allegiance? *Action in Teacher Education*, 34(1), 55-64. <https://doi.org/10.1080/01626620.2012.642288>.
- McLaren, P. (2015). *Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education*. Oxfordshire: Routledge.
- Nora, P. (1989). Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire. *Representations*, 26(Special Issue), 7-24. <https://doi.org/10.2307/2928520>.
- Olick, J. K., Vinitzky-Seroussi, V., & Levy, D. (2011). *The Collective Memory Reader*. Oxford: Oxford University Press.
- Osler, A. (2009). Patriotism, Multiculturalism and Belonging: Political Discourse and the Teaching of History. *Educational Review*, 61(1), 85-100. <https://doi.org/10.1080/00131910802684813>.



- Öztürk, F., Malkoc, S., & Ersoy, A. F. (2016). Patriotism as Perceived by Social Studies Teachers: An Outlook on the Individual, Society and Education. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Pamukkale University Journal of Education*, 2016(40), 205-218. <https://dx.doi.org/10.9779/PUJE803>.
- Parsons, T. (2017). *The School Class as a Social System: Some of Its Functions in American Society*. In *Exploring Education*. Oxfordshire: Routledge.
- Rajilun, M. (2019). The Use of Local Character's Biography to Build Nationalism and Patriotism. *International Journal Pedagogy of Social Studies*, 4(1), 41-50. <https://doi.org/10.17509/ijposs.v4i1.15975>.
- Remnick, D. (1994). *Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire*. New York: Vintage.
- Salevouris, M. J. (2015). *The Methods and Skills of History: A Practical Guide*. New York: John Wiley & Sons.
- Schatz, R. T. (2018). *A Review and Integration of Research on Blind and Constructive Patriotism*. In *Handbook of patriotism*. New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-30534-9>.
- Schatz, R. T. (2020). *A Review and Integration of Research on Blind and Constructive Patriotism*. In *Handbook of Patriotism*. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30534-9_30-1.
- Smith, A. D., & Smith, A. (2013). *Nationalism and Modernism*. Oxfordshire: Routledge.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104(11), 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Staub, E. (1992). *The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Stearns, P. N., Seixas, P., & Wineburg, S. (2000). *Knowing, Teaching, and Learning History. In National and International Perspectives*. New York: NYU Press.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for

- Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207-222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>.
- van-der-Ploeg, P. (2016). Dewey Versus ‘Dewey’ on Democracy and Education. *Education, Citizenship and Social Justice*, 11(2), 145-159. <https://doi.org/10.1177/1746197916648283>.
- Whitaker, E. (2012). *Stalin’s Resurrection*. London: History Today Ltd.
- Yazıcı, F. (2022). The Values Predicting Patriotism Attitudes in Turkey. *Current Psychology*, 41(1), 135-145.
- Yuval-Davis, N. (2014). *Intersectionality, Citizenship and Contemporary Politics of Belonging*. In *Contesting citizenship*. Oxfordshire: Routledge.